

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik berkaitan erat dengan pemahaman politik dan rasa percaya pada pemerintahan. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan politik memainkan peran penting dalam membangun legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Misalnya, pada proses pemilu, tingkat partisipasi politik masyarakat memengaruhi tingkat legitimasi terhadap paslon terpilih. Setiap individu mengantongi kecenderungan dan keperluan tersendiri dalam memutuskan pilihan mereka selama pemilu. Selain itu, kontribusi politik masyarakat pada pemilu juga bisa dilihat sebagai bentuk otoritas terhadap pemerintahan. Tingkat kontrol ini bervariasi sesuai dengan tingkat keterlibatan politik yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai elemen pusat dari demokrasi, partisipasi politik turut memiliki koneksi yang erat dengan penunaian hak-hak politik setiap warga negara.¹

Pemilu merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat yang berpedoman pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Sebagai salah satu wujud nyata dari proses demokrasi, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk mewujudkan tata kelola negara yang demokratis. Pemilu juga berfungsi sebagai jalur untuk membentuk Indonesia yang mandiri.

¹ Ni Ketut Arniti. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), hlm 330.

Oleh karena itu, mekanisme seleksi pemimpin mesti dilakukan dengan sangat cermat untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang memiliki kompetensi unggul dan bisa menyokong kemajuan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Sistem pemilu mencerminkan implementasi demokrasi yang juga merupakan pengamalan dari nilai sila keempat Pancasila.²

Dalam pemilihan umum, pasangan calon tidak hanya memperoleh sokongan dari partai pendukung, tetapi juga menyertakan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat sokongan dalam upaya memenangkan kontestasi. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam proses politik ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang berjalan. Dalam konteks ini, organisasi kemasyarakatan dapat dianggap telah melaksanakan perannya sebagai pengawas pemerintahan sekaligus memberikan dinamika baru dalam proses sosial politik. Pada setiap dinamika pemilu, keberadaan organisasi kemasyarakatan selalu menjadi pusat perhatian. Hal ini dapat dimengerti karena organisasi-organisasi tersebut memiliki sumber daya yang signifikan, seperti tokoh-tokoh berpengaruh dan jaringan struktur organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat paling bawah.³ Salah satu organisasi yang ada di Indonesia yakni Ahmadiyah, yang memiliki

² Zahara, Asni, et al. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. JURNAL EDUCANDUMEDIA, 02(01), hlm 3.

³ Moh. Fachrul Ananda I. (2019). Mobilisasi Politik: Ormas dalam Kontestasi Politik Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Jurnal Politik, hlm 2-3

anggota sekitar 600 ribu yang terpecah di 192 kabupaten/kota di 38 provinsi di Indonesia.⁴

Menurut Gibb, Ahmadiyah adalah aliran sempalan dari agama Islam yang tumbuh di India, dimulai sebagai sebuah tindakan pembaruan yang bersifat liberal dan cinta damai. Tujuan utamanya adalah menarik minat orang-orang yang merasa membutuhkan pembaruan dalam memahami agama. Ghulam Ahmad hadir dengan wawasan agama yang dianggapnya menjadi sahutan atas berbagai masalah dalam bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial. Pelajaran tentang toleransi, cinta damai, dan kasih sayang dalam ajaran Ahmadiyah juga menarik perhatian kelompok Kristen dan Hindu. Hal ini dikarenakan jemaat Ahmadiyah yang meyakini bahwa Ghulam Ahmad merupakan kelahiran kembali dari masing-masing tokoh dalam agama tersebut, seperti Nabi Muhammad, Isa dan Khrisna. Sehingga penerimaan terhadap Ahmadiyah relatif lebih terbuka di kalangan beberapa kelompok agama di India.⁵

Ahmadiyah mula mula masuk ke Indonesia pada tahun 1925 melalui seorang mubaligh bernama Maulana Rahmat Ali dari India.⁶ Ia mulai mendakwahkan ajaran Ahmadiyah di Jawa, terutama di Yogyakarta. Sebelumnya, beberapa pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di India telah terpapar ajaran

⁴ Amirullah. (2024). Acap Mendapat Persekusi, Mengapa Jemaat Ahmadiyah Terus Bertambah? <https://www.tempo.co/politik/jemaat-ahmadiyah-di-indonesia-1169057>. Diakses Pada 17 Januari 2025.

⁵Moh Muhtador. (2018). Ahmadiyah Dalam Lingkaran Teologi Islam (Analisis Sosial atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah). *Journal of Islam and Plurality*, 3(1), hlm 36-37.

⁶ Tim Ahmadiyah. (2022). Mengundang Ahmadiyah ke Nusantara. <https://ahmadiyah.id/sejarah-ahmadiyah-indonesia.html>. Diakses Pada 25 Januari 2025.

Ahmadiyah dan membawa ajaran tersebut pulang setelah mendirikan jemaat di Jawa, terutama di Jakarta dan Yogyakarta, Ahmadiyah mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain, termasuk Sumatra. Pada tahun 1926, Jemaat Ahmadiyah Indonesia resmi berdiri dengan pusatnya di Jakarta. Ahmadiyah mencapai Sumatra Barat sekitar pertengahan 1920-an hingga awal 1930-an. Penyebaran di Sumbar dilakukan oleh tokoh-tokoh yang berinteraksi dengan Ahmadiyah di Jawa, serta melalui mubaligh yang dikirim langsung oleh Jemaat Ahmadiyah. Beberapa daerah seperti Padang, Bukittinggi, dan Pariaman menjadi pusat penyebarannya. Jemaat Ahmadiyah kemudian mendirikan madrasah dan masjid untuk mendukung kegiatan dakwah mereka. Namun, penyebaran ini juga menghadapi tantangan dari masyarakat muslim yang menolak ajaran Ahmadiyah, terutama karena perbedaan pandangan mengenai kenabian.

Ahmadiyah sebagai kaum marginal banyak mengalami diskriminasi di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data SETARA Institute, dalam rentang waktu 2007 sampai 2020, terjadi 2.713 peristiwa pelanggaran KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) di Indonesia. 570 dari peristiwa tersebut dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Indonesia (JAI).⁷ Pada Tahun 2023 SETARA Institute catat 329 pelanggaran KKB dan 6 peristiwa dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia.⁸

⁷ Anugerah Ayu Sendari. (2024). Ahmadiyah dan Pusaran Hoaks di Tahun Politik 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5507776/ahmadiyah-dan-pusaran-hoaks-di-tahun-politik-2024?page=6>. Diakses pada 21 Mei 2025.

⁸ CNN Indonesia. (2024). SETARA Institute Catat 329 Pelanggaran KKB Sepanjang 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240623142229-20-1113090/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023>. Diakses Pada 21 Mei 2024.

Pada tahun 2021, ratusan warga mengacaukan dan memanggang sejumlah bangunan yang dimiliki jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Alhasil, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga mau tak mau dievakuasi.⁹ Selanjutnya jemaah Ahmadiyah juga mendapat diskriminasi di Kabupaten Garut. Dimana tempat ibadah jemaah Ahmadiyah pada Selasa, 2 Juli 2024 disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Satpol PP melakukan penutupan paksa terhadap masjid itu setelah terlebih dahulu menerima audiensi dari ormas yang mengatasnamakan GERAM (Gerakan Anti Ahmadiyah).¹⁰ Yang terbaru diskriminasi juga terdapat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penyelenggaraan kegiatan tahunan Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang dijadwalkan pada 6–8 Desember 2024 tidak diizinkan oleh pemerintah karena dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban dan kondusivitas wilayah.¹¹

Terbitnya Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, membuat Ahmadiyah tidak diakui menjadi bagian dari

⁹ Sania Mashabi dan Kristian Erdianto. (2021). Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Warga Ahmadiyah Tidak Dibenarkan. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/11115111/kekerasan-dan-diskriminasi-terhadap-warga-ahmadiyah-tidak-dibenarkan>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

¹⁰ Amnesty.id (2024). Jamaah Ahmadiyah Garut harus bebas beribadah. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jamaah-ahmadiyah-garut-harus-bebas-beribadah/07/2024/>. Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2025.

¹¹ Amnesty.id. (2024). Pelarangan pertemuan Jemaah Ahmadiyah bertentangan dengan komitmen keberagaman. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pelarangan-pertemuan-jamaah-ahmadiyah-bertentangan-dengan-komitmen-keberagaman/12/2024/>. Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2025.

Islam menyebabkan posisi Ahmadiyah lemah secara politik, karena sesuai dengan asumsi peneliti mayoritas partai-partai Islam tidak akan mau berafiliasi atau membela mereka karena dapat dikatakan tidak sealiran. Hal ini membuat kurangnya wadah untuk menuangkan aspirasi mereka dengan latar belakang organisasi Ahmadiyah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, mengingat organisasi Ahmadiyah telah berdiri di wilayah ini sejak tahun 1927, dengan kepemimpinan awal oleh Aboebakar Bagindo Maharadjo. Meskipun kerap menghadapi tantangan berat, termasuk diskriminasi sosial dan penolakan dari berbagai pihak, komunitas Ahmadiyah di Padang tetap bertahan dan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang dinamis.¹² Sejarah panjang serta konsistensi mereka dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan menjalankan aktivitas keagamaan menjadikan komunitas ini subjek yang penting untuk diteliti, khususnya terkait afiliasi politik mereka dalam Pemilu 2024.

Afiliasi politik Organisasi Ahmadiyah semakin relevan untuk dianalisis dalam konteks Pemilu 2024 yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif, karena mereka sering kali menghadapi tekanan sosial dan diskriminasi yang membatasi ruang gerak mereka. Meski demikian, mereka terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial di Kota Padang, seperti berpartisipasi dalam acara *car free day* dengan membentangkan pameran buku untuk memperkenalkan organisasi

¹² Ibid

Ahmadiyah¹³, serta ikut mendukung program kerja bakti massal *Bagoro Basamo* yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Padang.¹⁴ Aktivitas-aktivitas ini mencerminkan usaha Organisasi Ahmadiyah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar sekaligus menunjukkan peran aktif mereka dalam kehidupan sosial dan politik meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Berbicara mengenai partisipasi politik dan politik pada organisasi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya sudah meneliti mengenai hal tersebut yakni, Ni Ketut Artini¹⁵; Muhammad Salisul Hakim¹⁶; dan Dundin Zaenuddin¹⁷; Namun penelitian yang secara khusus membahas bentuk-bentuk partisipasi politik organisasi Ahmadiyah pada pemilu 2024 di Kota Padang belum ada. Sehingga hal tersebut menjadi keterbaruan pada penelitian yang peneliti jalankan.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana afiliasi politik organisasi Ahmadiyah pada pemilu 2024 di Kota Padang. Selain itu penelitian ini bisa menjadi penting apabila dimanfaatkan oleh orang yang memerlukan penelitian mengenai organisasi Ahmadiyah di Kota Padang.

¹³Talhah Lukman. A. (2023). Kenalkan Ahmadiyah sebagai Komunitas Muslim, JAI Padang Gelar Pameran Buku di Area CFD. <https://wartaahmadiyah.org/kenalkan-ahmadiyah-sebagai-komunitas-muslim-jai-padang-gelar-pameran-buku-di-area-cfd.html>. Diakses Pada 21 Januari 2025.

¹⁴ Talhah Lukman. A. (2024). Jemaat Ahmadiyah Padang Ikut Serta Sukseskan Padang Bagoro Basamo yang Digelar Pemkot. <https://wartaahmadiyah.org/jemaat-ahmadiyah-padang-ikut-serta-sukseskan-padang-bagoro-basamo-yang-digelar-pemkot.html>. Diakses Pada 21 Januari 2025.

¹⁵ Ni Ketut Artini, Loc. Cit

¹⁶ Muhammad Salisul Hakim. (2023). Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 04(01), 98-116.

¹⁷ Dundin Zaenuddin. (2024). Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi: Kasus Ormas Islam di Bandung. BRIN.

1.2 Rumusan Masalah

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana bagi warga untuk mengekspresikan hak kebebasan dalam berorganisasi dan berkumpul.¹⁸ Pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa organisasi masyarakat adalah “Suatu organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kepentingan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan untuk turut serta dalam proses pembangunan demi tercapainya tujuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila”.¹⁹ Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut ormas, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan guna mendorong terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera.²⁰

Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran signifikan dalam dinamika politik, termasuk dalam kontestasi pemilu. Sebagai wadah yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat, ormas sering kali menjadi penghubung antara rakyat dengan elite politik. Dalam konteks pemilu, ormas dapat berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan bahkan aktor politik yang memengaruhi pilihan politik masyarakat.

¹⁸ Dzikri Ghufraniillah dan Sri Wahyuni. (2022). Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat. *Res Publica*, 6(3), hlm 347.

¹⁹ BPHN. https://bphn.go.id/data/documents/organisasi_kemasyarakatan.pdf. Diakses Pada 25 Januari 2025.

²⁰ Nabih Amer. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 15(1), hlm 2.

Guru Besar Ilmu Politik UI, Maswadi Rauf, menjelaskan perbedaan mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik. Pada segi fungsi, ormas berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompoknya, juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan pemerintah, sedangkan partai politik berfungsi sebagai wadah partisipasi politik masyarakat dengan peran utamanya yakni pembuatan kebijakan politik. Pada segi ruang gerak, ormas tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan politik, tetapi lebih berfokus pada pengawasan dan advokasi kebijakan, sedangkan partai politik memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan politik. Secara keseluruhan, ormas dan partai politik memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam partisipasi politik masyarakat dan pengembangan demokrasi.²¹

Keberadaan ormas sering kali digunakan oleh partai politik untuk memperluas basis sokongan mereka. Melalui jaringan yang dimiliki, ormas mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, menyampaikan pesan politik, serta membangun narasi yang mendukung kandidat atau partai tertentu. Namun, peran ormas dalam pemilu tidak selalu netral. Beberapa ormas memiliki afiliasi politik yang kuat dengan partai tertentu atau kandidat tertentu. Afiliasi ini dapat terjadi karena kesamaan ideologi, kepentingan strategis, atau hubungan historis antara ormas dan aktor politik. Dalam banyak kasus, ormas juga berfungsi sebagai alat

²¹ Nyimas Zulfa Lisami. (2023). Guru Besar UI Jelaskan Perbedaan Ormas dan Parpol. <https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/guru-besar-ui-jelaskan-perbedaan-ormas-dan-parpol-Tj3zq>. Diakses pada 6 Februari 2025.

mobilisasi massa, yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat sekaligus memengaruhi arah suara pemilih.²²

Sebagai contoh, hubungan antara partai politik PKB dengan organisasi kemasyarakatan NU. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sendiri menyampaikan hubungan antara PK dan ormas Islam NU tak bisa disangkal selama ini. Selanjutnya Ia menengaskan bahwa PKB adalah partai politik yang lahir dari Rahim NU. Cak Imin juga mengikrarkan PKB akan terus dekat dengan warga NU.²³ Senada dengan PKB dan NU, Partai Politik PAN dan ormas Muhammadiyah pun juga memiliki hubungan yang spesial. Abdul Mu'ti Sekum PP Muhammadiyah menyebutkan secara jujur bahwa semasa ini komunikasi dengan PAN paling serius dibanding dengan partai politik lainnya. Ketua umum PAN Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa PAN adalah anak kandung Muhammadiyah dan selalu memiliki tempat khusus di PAN.²⁴

Dalam konteks Pemilu 2024, keterlibatan masyarakat dari berbagai lapisan sosial, termasuk komunitas minoritas, menjadi bagian penting dalam prosedur demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu merupakan wujud keterlibatan warga negara dalam mekanisme pengambilan keputusan publik. Namun, bagi kelompok minoritas seperti komunitas Ahmadiyah di Indonesia, partisipasi politik

²² Fachrul Ananda. Loc. Cit

²³ CNN Indonesia. (2023). Cak Imin: Hubungan NU dan PKB Tak Bisa Dipungkiri. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230206201337-32-909646/cak-imin-hubungan-nu-dan-pkb-tak-bisa-dipungkiri>. Diakses Pada 7 Februari 2025.

²⁴ Faisal. (2024). Sekum PP Muhammadiyah Buka-bukaan Soal Hubungan dengan PAN. <https://www.sapanusa.id/obrolin%20pemilu/30135546/sekum-pp-muhammadiyah-buka-bukaan-soal-hubungan-dengan-pan>. Diakses Pada 7 Februari 2025.

sering kali tidak berjalan ideal. Kelompok ini kerap menghadapi stigma dan diskriminasi yang memengaruhi peran mereka dalam pemilu, termasuk dalam menentukan afiliasi politik mereka di tengah dinamika politik nasional dan lokal. Banyak bentuk diskriminasi yang telah dirasakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, seperti penyegelan masjid, kekerasan fisik, penyerangan dan pengusiran dari pemukiman, yang tidak sedikit tercatat korban jiwa dari peristiwa tersebut.

Pemilu di Kota Padang selalu menarik perhatian karena pola pilihan masyarakatnya yang cenderung mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam menentukan preferensi politik. Kota ini dikenal memiliki masyarakat yang religius, sehingga partai-partai dengan platform agamis sering kali mendapatkan dukungan besar. Seperti pada pemilu DPR 2019 di Kota Padang, PKS sebagai partai agamis berada pada peringkat ketiga dengan memperoleh 63 ribu suara.²⁵ Sedangkan pada pemilu tahun 2024 PKS berada pada peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 81.408 ribu.²⁶ Dukungan ini mencerminkan kecenderungan masyarakat Padang memilih kandidat dengan latar belakang dan nilai-nilai yang sejalan dengan karakter religius mereka.

Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Ahmadiyah menetapkan bahwa Paham Ahmadiyah dinilai tidak termasuk dalam ajaran Islam,

²⁵ Adi Ahdiat. (2023). 5 Partai Politik Peraih Suara Terbanyak Padang pada Pemilu DPR 2019. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/f73e3a2e0cf120f/5-partai-politik-terkuat-di-kota-padang-pada-pemilu-2019>. Diakses Pada 8 Februari 2025.

²⁶ Langgam.id. (2024). Berikut Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Anggota DPRD Padang, PKS Teratas. <https://langgam.id/berikut-perolehan-suara-sah-partai-politik-pada-pemilihan-anggota-dprd-padang-pks-teratas/>. Diakses Pada 8 Februari 2025.

dianggap menyimpang dan menyesatkan, serta umat Islam yang mengikutinya dipandang telah keluar dari Islam. Oleh karena itu, negara dipandang memiliki tanggung jawab untuk menghentikan penyebaran ajaran Ahmadiyah di seluruh wilayah Indonesia, membekukan keberadaan organisasinya, serta menutup seluruh tempat yang digunakan untuk aktivitas mereka..²⁷ Dari fatwa ini, sangat sulit Ahmadiyah akan mendukung partai ataupun calon yang berbasiskan massa Islam seperti PKS. Kemungkinan Ahmadiyah mendukung partai nasionalis yang cenderung kurang mempertimbangkan faktor agama dalam politik dan negara.

Namun, bertentangan dengan Ahmadiyah yang memiliki ideologi berbeda, dalam fenomena ini peneliti menemukan bahwa Ahmadiyah di Kota Padang cenderung memilih partai politik yang berideologi nasionalis dibandingkan dengan ideologi agamis, karena partai nasionalis cenderung menjunjung pluralisme dan tidak memiliki batasan-batasan ketat terkait organisasi keagamaan. Terdapat tiga pembagian dari partai di Indonesia, yakni partai Islam, partai berbasis masa Islam dan partai nasionalis sekuler.²⁸ Partai Islam merupakan partai yang berideologikan agama Islam, mereka menyampaikan aspirasi muslim ke dalam kebijakan pemerintah, contohnya yakni partai PBB, PPP dan PKS. Selanjutnya partai berbasis massa Islam, merupakan partai yang memperoleh dukungan dari ormas-ormas

²⁷ Mui Digital. (2023). Aliran Ahmadiyah. <https://mui.or.id/baca/fatwa/aliran-ahmadiyah>. Diakses Pada 8 Februari 2025.

²⁸ Anies R. B. (2004). Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory. *Asian Survey*, 44(5), 669–690. <https://doi.org/10.1525/as.2004.44.5.669>

Islam meskipun tampak pluralistik, contohnya yakni PKB yang secara formal menganut ideologi Pancasila tetapi berfungsi sebagai sayap politik NU, dan PAN yang mirip dengan PKB yang dikaitkan erat dengan Muhammadiyah. Terakhir adalah partai nasionalis sekuler, merupakan partai yang memiliki ideologi Pancasila, contohnya partai PDIP dan Golkar.

Ahmadiyah juga pernah mendapatkan diskriminasi dari pemerintahan Sumatera Barat pada tahun 2011, yakni dengan diresmikannya Pergub Nomor 17/2011 yang diterbitkan pada 24 Maret 2011 tentang larangan kegiatan Ahmadiyah Indonesia, larangan pendakwaan ajaran Ahmadiyah, larangan pemasangan papan organisasi Ahmadiyah juga dilarang bagi Jemaat Ahmadiyah untuk menggunakan atribut Ahmadiyah dalam bentuk apa pun di Provinsi Sumatera Barat.²⁹ Hal ini memperkuat asumsi awal mengenai afiliasi politik Ahmadiyah.

Setelah mendirikan jemaat di Jakarta dan Yogyakarta, Ahmadiyah mulai menyebar ke wilayah lain, termasuk Sumatra Barat, pada pertengahan 1920-an hingga 1930-an. Penyebaran ini dilakukan oleh tokoh-tokoh yang telah berinteraksi dengan Ahmadiyah di Jawa serta mubaligh yang dikirim langsung oleh Jemaat Ahmadiyah. Meski berhasil mendirikan madrasah dan masjid, penyebaran

²⁹ Jpnn.com. (2011). Sumbar Resmi Larang Aktiivitas Ahmadiyah. <https://www.jpnn.com/news/sumbar-resmi-larang-aktivitas-ahmadiyah?page=3>. Diakses Pada 10 Februari 2025.

Ahmadiyah menghadapi tantangan dari kelompok masyarakat muslim yang menolak ajaran ini, terutama karena perbedaan pandangan mengenai kenabian.³⁰

Pada pemilu 2024, organisasi Ahmadiyah tidak terlepas dari hoaks yang selalu beredar. Hoaks yang beredar memberikan pandangan buruk pada organisasi Ahmadiyah. Hoaks yang terjadi meningkatkan diskriminasi yang ujungnya berdampak pada partisipasi politik organisasi Ahmadiyah.³¹ Ini karena diskriminasi yang sering diterima oleh mereka, dan berharap bisa mendapatkan hak yang sama dengan warga pada umumnya. Toleransi acap kali menjadi janji manis yang dilontarkan oleh para politisi untuk organisasi Ahmadiyah.³²

Pada diskusi publik “Melawan Hoaks Bersama Kelompok Lintas Agama” di Kota Padang dalam rangka deklarasi Pilkada Damai 2024. Perwakilan organisasi Ahmadiyah juga ikut sebagai perwakilan dengan serukan untuk masyarakat melihat keakuratan informasi yang disampaikan.³³ Ini menunjukkan keikutsertaan organisasi Ahmadiyah berpartisipasi dalam politik, namun tentunya tidak hanya hal ini sebagai bentuk partisipasi politik organisasi Ahmadiyah.

³⁰ Tim Ahmadiyah. Loc. Cit

³¹ Anugerah Ayu Sendari. (2024). Ahmadiyah dan Pusaran Hoaks di Tahun Politik 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5507776/ahmadiyah-dan-pusaran-hoaks-di-tahun-politik-2024?page=7>. Diakses Pada 20 Januari 2025.

³² Siti Fatimah. (2024). Potret Ahmadiyah Sukabumi dalam Bayang-Bayang Janji Politik. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7697032/potret-ahmadiyah-sukabumi-dalam-bayang-bayang-janji-politik>. Diakses Pada 20 Januari 2025.

³³ Devi Savitri. (2024). Menjadi Perwakilan Deklarasi Pilkada Damai 2024, Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Pampangan Serukan Cek Akurasi Informasi. <https://wartaahmadiyah.org/menjadi-perwakilan-deklarasi-pilkada-damai-2024-mubaligh-jemaat-ahmadiyah-pampangan-serukan-cek-akurasi-informasi.html>. Diakses Pada 20 Januari 2025.

Penelitian ini mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana afiliasi, kecenderungan kedekatan dan pilihan politik organisasi Ahmadiyah dalam Pemilu 2024?.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ada atau tidaknya afiliasi politik organisasi Ahmadiyah dan partisipasi politik yang dilakukan oleh organisasi Ahmadiyah dalam Pemilu tahun 2024 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna untuk studi Ilmu Politik untuk memperjelas bagaimana bentuk afiliasi dan partisipasi politik yang dilakukan oleh organisasi Ahmadiyah dalam Pemilu tahun 2024 di Kota Padang. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan bagi para peneliti lain yang akan juga meneliti kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjelaskan bentuk afiliasi dan partisipasi politik organisasi Ahmadiyah pada Pemilu 2024 di Kota Padang.